



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MASMANSUR
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 744713

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 5.157.700.000

1. Tanah Seluas 396 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 303 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 580 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 947 m2/300 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 1.597.700.000
6. Tanah Seluas 1079 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
7. Tanah Seluas 3597 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
8. Tanah Seluas 8448 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
9. Tanah Seluas 4730 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
10. Tanah Seluas 1350 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000
11. Tanah Seluas 396 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	952.290.000
1. MOBIL, TOYOTA TRUCK Tahun 2011, HASIL SENDIRI	Rp.	
131.220.000		
2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2014, HASIL SENDIRI	Rp.	
7.695.000		
3. MOTOR, MIO MATIC Tahun 2014, HASIL SENDIRI	Rp.	6.075.000
4. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2020, HASIL		
SENDIRI Rp. 591.300.000		
5. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI	Rp.	
216.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	684.417.011
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	6.794.407.011
III. HUTANG	Rp.	172.105.027
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.622.301.984

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.